

MENGGAGAS “DESA INFORMASI” DI PERBATASAN

INITIATING “DESA INFORMASI” IN THE BORDERLINE

S. Arifianto

Puslitbang APTIKA & IKP, Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo.

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110. Telp./Fax.: 021-3800418

e-mail: arief2008@gmail.com

Naskah diterima tanggal 20 Maret 2014, direvisi tanggal 28 Mei 2014, disetujui pada tanggal 9 Juni 2014

Abstract

The pattern of communication and social structure on villagers in borderline of West Kalimantan, generally are more dominant to be influence and construct by media and culture of Malaysia. Those conditions influence the response of people towards government policy and access to information through the communications infrastructure on the border. The purpose of the research are to explain, the responses of people, and factors that influence the integration of information technology infrastructure, social communication institution, and community resources as a supporting component of “Desa Informasi”. This qualitative research is using single case study methodology with emic perspective. Primary data are gathered from FGD and interview with informant. Secondary data are from literature study, document and other publicity material. The technique to process the data are using classification based on the structure of the theme, summarized and analyzed. Unit analysis of social communication institution. The results showed that: the villagers of Jagoi still not optimal in responding to the idea of rural development information, because they never receive information about the village concept comprehensively through socialization. Whereas the factors that influence the development of “Desa Informasi” in rural Jagoi, are because the ICT’s infrastructure and internet, institutions of social communication, community resources, and its uses to access information as community’s needs that had economic value to support the idea of “Desa Informasi” development, which still not integrated yet.

Keywords: *Integration of Infrastructure, Institutions of Social Communication, Public Response, Desa Informasi”*

Abstrak

Pola komunikasi dan struktur sosial masyarakat desa perbatasan di Kalimantan Barat umumnya lebih dominan dipengaruhi dan dikonstruksi oleh media dan budaya Malaysia. Kondisi tersebut memengaruhi respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, serta akses informasi melalui infrastruktur komunikasi di perbatasan. Tujuan penelitian untuk menjelaskan, respon masyarakat, dan faktor yang berpengaruh terhadap pengintegrasian infrastruktur teknologi informasi, lembaga komunikasi sosial, dan sumberdaya masyarakat sebagai komponen pendukung desa informasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus tunggal dengan perspektif emik. Data primer dikumpulkan melalui FGD dan wawancara dengan informan. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, dokumen dan bahan publikasi lainnya. Teknik pengolahan data dengan pengklasifikasian berdasarkan struktur tema, disimpulkan dan dianalisis. Unit analisis kelembagaan komunikasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan: Masyarakat Desa Jagoi masih belum optimal dalam merespon gagasan pengembangan desa informasi, karena belum pernah mendapatkan informasi secara komprehensif melalui sosialisasi tentang konsep desa informasi. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan desa informasi di Desa Jagoi, karena belum terintegrasinya infrastruktur TIK dan internet, lembaga komunikasi sosial masyarakat, sumber daya masyarakat, dan menjadikannya akses informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang bernilai ekonomi untuk mendukung gagasan pengembangan desa informasi.

Kata kunci: Integrasi Infrastruktur, Lembaga Komunikasi Sosial, Respon Masyarakat, Desa Informasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa informasi di perbatasan secara filosofis, diasumsikan sebagai representasi potret masyarakat desa di perbatasan, di mana untuk memenuhi kebutuhan pola kehidupan sehari-hari, masyarakat mendapatkannya melalui akses informasi dari internet. Potret komunitas desa global seperti itulah yang menjadi target pengembangan desa informasi yang digagas pemerintah selama ini. Meski pada tataran pelabelan “desa informasi” dari aspek ketatabahasaan “salah kaprah”. Mungkin yang dimaksud desa informasi semacam “desa global” (*global village*) yang dikonsepsikan McLuhan (1964), dalam Davis (2010), bahwa di era digital yang serba komputer masyarakat akan mengalami pola perubahan komunikasi. Maka desa informasi idealnya dapat diidentifikasi sebagai terbentuknya komunitas desa berjaringan, yang bersentuhan langsung dengan informasi dalam pola perilaku masyarakat sehari-hari (Santoso, 2010). Pada konteks tersebut akses informasi berrelasi dengan perubahan pola pikir masyarakat, di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digunakan untuk mengatasi kesenjangan informasi dan komunikasi (Margareth, 2003). Untuk mencapai target tersebut kebijakan pengembangan desa informasi dilakukan melalui tiga tahap, di antaranya (a). pengembangan desa informasi di wilayah perbatasan, (b). pengembangan desa informasi di wilayah tertinggal, dan (c). pengembangan desa informasi di kepulauan terluar (Renstra Kominfo, 2009-2014). Sementara wilayah perbatasan di Indonesia, di samping masalah geografis, juga memiliki karakteristik yang unik dan persoalan yang sangat kompleks. Misalnya perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan sepanjang 2.004 Km secara geografis termasuk daerah *blankspot* untuk akses informasi¹. Sementara penanganan

masalah perbatasan di Indonesia sepenuhnya menjadi domain Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang dilaksanakan secara terintegrasi². Realitasnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai 81.900 kilometer, dan berbatasan dengan beberapa negara baik darat maupun laut masih belum *ter-manage* dengan baik.

Perbatasan darat secara langsung yaitu: Malaysia, Papua *NewGuinea* (PNG) dan Timor Leste, tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten/ kota yang memiliki karakteristik bervariasi. Sedangkan perbatasan laut langsung dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (BNPP, 2011). Wilayah perbatasan laut ini terdiri dari pulau-pulau terluar sebanyak, 92 pulau termasuk kepulauan kecil (BPPT, 2010). Berdasarkan data tersebut pengembangan desa informasi di perbatasan dianalogikan berrelasi dengan misi pembangunan nasional, di antaranya, (a). menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, (b). pertahanan keamanan nasional, serta (c). meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di perbatasan. Untuk pengembangan wilayah perbatasan selama ini digunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) tanpa harus meninggalkan pendekatan keamanan (*security approach*). Di mana pengembangan wilayah perbatasan juga bertujuan menjaga keutuhan wilayah NKRI, di samping meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (RPJM Nasional, 2009-2014).

Pada saat ini permasalahan wilayah perbatasan di Indonesia tidak sebatas yang bertautan dengan keamanan, sosial, budaya, dan ekonomi, tetapi juga bertautan dengan kesenjangan informasi dan komunikasi (Bappenas, 2010). Secara umum permasalahan tersebut cukup bervariasi, misalnya di

¹Lihat Penelitian dan Pengembangan Wilayah Perbatasan Berbasis Sumber Daya Daerah, yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 2010.

²Lihat UU No: 43/2008 tentang Wilayah Perbatasan Negara, dan Perpres No: 12/2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Perbatasan Secara Terpadu dan Terintegrasi.

Indonesia bagian barat persoalan ekonomi lebih cenderung dominan, sedangkan di Indonesia bagian timur di samping persoalan ekonomi juga masalah keamanan³. Melihat fenomena seperti itu pengembangan desa informasi di perbatasan menjadi isu yang dianggap strategis. Meski dalam praktiknya gagasan pengembangan desa informasi di perbatasan itu sendiri tidak bisa lepas dari aspek sinergitas infrastruktur TIK, kelembagaan komunikasi dan sumber daya masyarakat di desa perbatasan. Pengintegrasian komponen tersebut tetap memiliki nilai strategis untuk mendukung pengembangan desa informasi di perbatasan. Pada tingkat inisiasi kebijakan pembangunan desa informasi yang dilakukan Kominfo selama ini memang terlihat sangat populis. Konsep dasar filosofi pembentukannya untuk mengejar target agar tercapainya masyarakat Informasi 2015⁴. Pada tataran konsep pengembangan desa Informasi merupakan upaya pemerintah (Kominfo) untuk menjadikan masyarakat di perdesaan lebih maju, pintar dan meningkatkan kesejahteraannya⁵. Pengembangan desa informasi itu sendiri merupakan implementasi program prioritas Nasional Kominfo berdasarkan Instruksi Presiden No: 01 Tahun 2010. Di mana pengembangan “desa informasi” di wilayah perbatasan secara pragmatis untuk menangkal melubernya arus informasi dan budaya asing. Dominasi akses informasi dan budaya asing diasumsikan berdampak terhadap luntarnya pemahaman nilai-nilai Nasionalisme

kebangsaan, serta kecintaan terhadap NKRI bagi masyarakat di perbatasan⁶.

Fenomena tersebut mendorong para pemangku kebijakan untuk segera mengambil keputusan politik. Permasalahannya mengapa dan bagaimana masyarakat di perbatasan cenderung tertarik pada kebijakan Negara Malaysia. Apakah gagasan pengembangan desa informasi di perbatasan menjadi kebutuhan masyarakat perbatasan? Lantas bagaimana menyinergikan infrastruktur, sumber daya masyarakat, kelembagaan komunikasi, dan konten informasi yang menjadi komponen desa informasi. Faktor apa saja yang sekiranya berpengaruh terhadap gagasan pengembangan desa informasi di perbatasan?.

Sederet pertanyaan tersebut menjadi permasalahan desa di perbatasan. Dengan demikian fokus tulisan artikel ini untuk menjelaskan relasi infrastruktur teknologi informasi, kelembagaan komunikasi dan sumberdaya masyarakat dalam konteks perwujudan gagasan pengembangan desa informasi di “Desa Jagoi” Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Serawak Malaysia. Berangkat dari ruang lingkup dan permasalahan tersebut, maka permasalahan kajian ini dirumuskan sebagai berikut: (1). Bagaimana respon masyarakat terhadap gagasan pengembangan desa Informasi di Desa Jagoi. (2). Bagaimana persoalan pengintegrasian infrastruktur teknologi informasi, kelembagaan komunikasi dan sumberdaya masyarakat untuk mendukung gagasan pengembangan desa informasi di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat.

³Lihat hasil kajian Dirjen IKP bekerja sama dengan UGM, tentang Studi Evaluasi Desa Informasi Ditinjau dari aspek Penguatan Kelembagaan, yang dilaksanakan tahun 2011.

⁴Target konvensi WSIS Jenewa pada tahun 2015, yang tercantum dalam resolusi PBB, agar semua Negara di dunia telah mencapai akses informasi 50% /siaran pers portal kominfo.go.id/2012.

⁵<http://sosbud.kompasiana.com/2011/04/24/desa-informasi-menjadikan-masyarakat-pintar-357626.html>, diakses 10 Februari, 2013.

⁶Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengawatirkan warga Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan lebih mudah mengakses informasi dari Negara Asing dibanding dari Negeri sendiri. Akibatnya membuat warga di perbatasan diserbu informasi asing, demikian sambutan Dirjen PPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Syukri Batubara, ketika meresmikan Desa Informasi di Sumatra Utara, pada tanggal 14 Desember 2011 (www.detik.net.com/ diakses 16 Januari 2012).

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tulisan artikel ini untuk menjelaskan dan mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap gagasan pengembangan desa informasi di perbatasan Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dengan Negara Serawak Malaysia yang bertautan dengan, (1). Mencari tahu dan menjelaskan respon masyarakat Desa Jagoi terhadap gagasan pengembangan desa Informasi. (2). Menjelaskan dan mengidentifikasi faktor penting terhadap relasi infrastruktur, kelembagaan komunikasi dan sumber daya masyarakat yang mendukung gagasan pengembangan desa informasi di Desa Jagoi. Sementara manfaat hasil penelitian ini secara akademik dapat menambah pengayaan ilmu pengetahuan bagi praktisi dan peneliti. Secara substansi diharapkan dapat digunakan sebagai informasi awal untuk menentukan kriteria pengembangan desa informasi, di perbatasan oleh pemangku, pembuat kebijakan di pemerintahan, khususnya bagi Dirjen IKP Kementerian Kominfo, di Jakarta.

Kerangka Konsep

Gagasan membangun sebuah desa informasi di perbatasan sebagai desa penyangga posisinya sangat strategis. Dikatakan desa penyangga karena ia menjadi pintu gerbang di kawasan perbatasan, yang berhadapan langsung dengan negara asing. Strategis karena kebijakannya bertautan dengan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melebihi kapasitas wilayah geografis desanya. Semua permasalahan itu berrelasi dengan eksistensi negara asing yang berhimpitan dengan desa-desa lain di perbatasan. Konsep pengembangan desa informasi di perbatasan secara “harfiah” dapat dimaknai untuk meminimalisasi kesenjangan informasi, sosial, budaya, politik dan ekonomi, bagi masyarakat komunitas desa di perbatasan. Desa informasi di perbatasan idealnya sebagai sebuah desa berjejaring. Di mana semua komponen infrastruktur TIK,

lembaga-lembaga komunikasi sosial, sumber daya masyarakat terintegrasi dengan baik dalam konteks untuk pemenuhan kebutuhan informasi sebagai basisnya. Pengelolaan informasi itu akhirnya dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di perbatasan dengan memanfaatkan infrastruktur TIK yang ada di desa yang bersangkutan.

Relasi itu juga dapat dilihat dari berbagai aspek, baik aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi sebagai *supporting* sistem untuk membangun desa informasi di perbatasan. Hadirnya TIK dan jaringan internet di berbagai desa perbatasan jika dikelola secara profesional dapat memotivasi serta menjadi penguatan komunitas desa, dalam konteks pemberdayaan masyarakat di perbatasan. Maka konsep pengembangan desa informasi di perbatasan tidak bisa lepas dari konsep pemberdayaan komunitas desa itu sendiri. Ia juga tidak bisa dipisahkan dengan komponen pendukung lainnya dalam hal kebijakan publik yang melingkupinya (Abidin, 2002). Contoh, kebijakan operator telekomunikasi setempat, peran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, partisipan Lembaga Swadaya Masyarakat dan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Peran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk memberikan jaminan subsidi pembiayaannya. Operator telekomunikasi untuk penyediaan infrastruktur akses informasi. Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat, termasuk Perguruan Tinggi dan swasta, dalam konteks dukungan kerja sama dengan desa informasi di perbatasan. Konsep pengembangan “desa informasi” di perbatasan pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perbatasan tentang akses informasi. Di mana semua kebutuhan dasar itu bertautan dengan berbagai aspek (sosial, budaya, ekonomi, politik, sumber daya, ilmu pengetahuan) dan aspek lain yang bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat di perbatasan. Jadi “desa informasi” dibutuhkan jika ia mampu menjawab permasalahan dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat disetiap desa perbatasan. Maka pengembangan

desa informasi di perbatasan tidak bisa berdiri sendiri, dan kehadirannya perlu di-*combine* dengan komponen, dan fungsi-fungsi kelembagaan komunikasi lain yang ada di desa perbatasan tersebut.

Tinjauan Pustaka

Desa informasi identik dengan desa berjaringan (Santoso, 2012). Maka komponen desa informasi seperti, (insfrasruktur, kelembagaan komunikasi masyarakat, dan sumber daya masyarakat) akan berfungsi sebagai pendukung jika saling berintegrasi. Di mana integrasi antarkomponen desa informasi diperlukan standardisasi operasional. Pada bagian lain eksistensi desa informasi diperlukan adanya kesiapan sumber daya, sarana dan dukungan kecukupan finansial. Demikian juga kesiapan sumber daya masyarakat secara sosial, budaya dan ekonomi tidak kalah pentingnya dengan teknologi (TIK) dan sumber daya energi. Penguasaan komponen TIK dan jaringan internet dalam konteks pengembangan desa informasi perlu terintegrasi dengan aspek sosial, budaya, ekonomi dan lainnya (Heeks, 2002). Realitasnya sekarang TIK lebih dominan dilihat dari aspek teknologinya saja. Artinya TIK dan internet dalam desa informasi hanyalah sebuah alat (*tools*) hasil konstruksi dan rekayasa manusia yang tidak terpisahkan dengan konteks dan akar budayanya. Atas dasar pemikiran dan konsep tersebut, desa informasi adalah sebuah desa yang dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi kriteria akses informasi tertentu berdasarkan kebutuhan masyarakatnya dengan menggunakan teknologi tertentu sebagai alat ukurnya. Secara teoretik konsep yang mendasari deterministik teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah terbentuknya konstruksi sosial tentang proses adopsi TIK bagi masyarakat penggunaanya (Rogers, 1995).

Sedangkan proses pengembangan TIK itu sendiri berakar dari sifat dan karakternya. Analoginya TIK akan berkembang dengan sendirinya selama prasarana dan komponen

TIK itu tersedia di sekitar wilayah perbatasan (infrastruktur jaringan akses informasi, energi dan komponen lain yang terkait). Konsep konstruksi sosial ini meyakini jika pengembangan TIK sangat tergantung dari aspek nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat lokal, di mana komponen TIK itu diadopsi oleh masyarakat (Rogers, 1995). Konsep tersebut menekankan bahwa informasi menjadi kunci untuk memahami TIK, dalam konteks pengembangan desa informasi di perbatasan. Maka TIK dalam penelitian ini didefinisikan sebagai cara elektronik untuk memperoleh informasi, menyimpan, mengolah dan mendiseminasikannya⁷. Jadi apa yang dilakukan TIK adalah memberi mekanisme baru untuk memperoleh dan mengolah sumber daya informasi yang sudah ada di desa perbatasan.

Ketika masyarakat perbatasan berkeinginan memahami TIK dan internet maka terlebih dulu harus belajar bagaimana informasinya. Untuk memahami TIK yang menjadi komponen utama pengembangan “desa informasi” di perbatasan maka masyarakat harus mengadopsi TIK terlebih dahulu sebagai sarannya. Hariyanto (2008: 17), menganalogikan hal ini sebagai sebuah model pembelajaran melalui media elektronik. Ketika masyarakat mempersiapkan desa informasi, terlebih dulu mereka harus memahami bagaimana memperoleh dan mengolah informasi. Bagaimana hal tersebut dapat mereka lakukan, dan bagaimana upaya pengembangannya (Turner, 2007). Jika kita lihat masyarakat perbatasan sebagai pengguna TIK dalam konteks pengembangan desa informasi, maka aspek nilai-nilai sosial dan budaya merupakan kebutuhan *content* lokal yang harus terakomodasi. Di mana *content* itu lebih dikenal dengan istilah kearifan lokal (*local wisdom*) yang harus mereka kembangkan sendiri sebagai identitas (*society indentity*). Persesuaian dengan kebutuhan *content* lokal

⁷Lihat definisi TIK di UU No: 11/2008/ tentang ITE, dan penjelasannya.

ini menjadi penting ketika berinteraksi dengan masuknya budaya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tataran masyarakat lokal. Proses tersebut oleh Giddens (1997) diistilahkan dengan modernisasi (*modernity*) kehidupan masyarakat. Konsep modernisasi dapat diterima ketika (TIK) sebagai budaya asing tidak mematikan dan menggerus budaya lokal yang memiliki nilai sosial, dan budaya di komunitasnya. Nilai sosial dan budaya inilah yang berpengaruh terhadap diterima tidaknya budaya baru (komponen desa informasi) yang masuk di komunitas desa perbatasan. Ketika kita melihat fenomena seperti itu maka respon masyarakat dan faktor-faktor komponen yang berpengaruh terhadap masuknya budaya baru harus diperhitungkan.

Konsep Respon Masyarakat

Pada tataran konsep, “respon” dapat diasumsikan sebagai reaksi yang diwujudkan dalam sikap, atau perilaku masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap kebaruan atau mengandung keanehan. Respon penekanannya lebih pada tingkah laku dari hasil tanggapan terhadap rangsangan atau stimulus (Wirawan, 1995). Pada konteks ini “respon” dianalogikan sebagai suatu tindakan, reaksi atau jawaban yang bertautan dengan stimulus. Pada konteks ini individu manusia berperan serta sebagai pengendali antara stimulus dan respon itu sendiri. Artinya yang menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus adalah interaksi stimulus dan faktor individu itu sendiri. Interaksi antara beberapa faktor eksternal itu, berupa objek, orang-orang yang membentuk sikap, dan emosi pengaruh masa lampau yang akhirnya membentuk perilaku yang ditampilkannya. Di mana respon seseorang bisa berbentuk baik, buruk, positif, negatif dan sejenisnya, (Azwar, 1988).

Secara konseptual respon dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) komponen, yakni komponen kognisi (pengetahuan), komponen afeksi (sikap), dan komponen psikomotorik (tindakan). Respon dalam konteks penelitian ini adalah reaksi atau tanggapan

masyarakat desa perbatasan terhadap stimulus, hadirnya TIK dan jaringan internet yang diwacanakan sebagai komponen desa informasi. Respon tersebut bisa bersifat negatif, maupun positif. Respon negatif berupa reaksi spontan, atau tanggapan masyarakat yang kurang atau tidak setuju dengan gagasan desa informasi di perbatasan. Sedangkan respon positif justru sebaliknya, yakni tanggapan, atau sikap masyarakat yang menyetujui atas gagasan desa informasi di perbatasan. Respon masyarakat itu tercermin dari bahasa oral, maupun bahasa tubuh yang mereka perankan ketika berinteraksi dengan peneliti.

Konsep Faktor Penting (Yang Pengaruh)

Antara infrastruktur, kelembagaan komunikasi masyarakat, sumber daya masyarakat, serta komponen lainnya dalam gagasan “desa informasi” di perbatasan merupakan anatomi jaringan komunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap komponen yang satu dengan komponen lainnya. Gagasan “desa informasi” itu sendiri pada hakikatnya merupakan ikatan jejaring semua komponen itu sehingga membentuk mata rantai komunikasi, dan informasi secara struktural untuk penguatan kelembagaan komunikasi dan informasi di perbatasan. Maka penguatan kelembagaan komunikasi masyarakat posisinya sangat penting. Penguatan jejaring kelembagaan komunikasi masyarakat untuk memberikan jaminan dan dukungan ketika gagasan desa informasi diimplementasikan di desa perbatasan. Melalui jejaring itulah konten informasi dapat ditransformasikan kepada publik. Meski implementasi operasional komponen pendukung desa informasi masih harus dikolaborasikan dengan kebijakan pembangunan wilayah perbatasan dengan pemerintah setempat. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki spesifikasi tersendiri, yang berbeda dengan pembangunan wilayah pada umumnya. Kebijakan pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia saat ini mengalami perubahan orientasinya, dari “*inward looking*” menjadi “*outward looking*”, sebagai

pintu gerbang ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga (Suprayogo, 2010). Merujuk pada konsep tersebut relasi jejaring komponen kelembagaan yang mendukung terciptanya sebuah gagasan desa informasi di perbatasan sudah harus mengacu dan terintegrasi dengan konsep pembangunan wilayah perbatasan tersebut. Dengan kerangka konsep ini setidaknya dapat digunakan untuk menjelaskan, mengidentifikasi dan menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari lokasi penelitian di Desa Jagoi ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode “studi kasus tunggal”, dengan pendekatan kualitatif perspektif emik. Pendekatan ini dipilih karena peneliti tidak mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Peneliti terlibat langsung ketika menggali dan mengumpulkan data penelitian kualitatif di lokasi penelitian. Studi kasus merupakan kajian penelitian kualitatif yang rinci dari suatu latar belakang peristiwa tertentu (Yin, 2006). Studi kasus lebih memosisikan sebagai strategi penelitian, tetapi studi kasus juga dapat digunakan untuk meneliti individu dan kelompok komunitas tertentu (Idrus, 2009). Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tunggal yang menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap berapa kasus yang sedang diteliti.

Di mana tujuannya untuk memahami konstruk fenomena umum dari kasus yang bersangkutan (Idrus, 2009). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi terfokus dan wawancara mendalam dengan informan terpilih di lokasi penelitian. Teknik observasi dilakukan, untuk memahami data kualitatif dalam konteks keseluruhan situasi sosial budaya untuk memperoleh paradigma yang bersifat holistik. Peneliti ingin memperoleh pengalaman langsung, dan tidak terpengaruh berbagai pandangan yang ada sebelumnya. Sedangkan model analisis interaktif, yakni melakukan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan

(Milles & Haberman 1992). Penelitian dilakukan pada Bulan Oktober, 2013 di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Unit analisis: lembaga komunikasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data

Di bagian ini disajikan data kualitatif hasil penelitian serta pembahasan dan analisis data yang telah direduksi sesuai dengan pengklasifikasian berdasarkan indikator masing-masing yang kemudian ditampilkan sebagai berikut:

Profil Desa Jagoi: Desa Jagoi di Kecamatan Jagoi Babang, terdiri dari tiga dusun yakni Dusun Jagoi Babang, Dusun Risau, dan Dusun Sei Take, di mana dusun-dusun ini letaknya saling bersebelahan. Desa Jagoi dihuni oleh 2.495 jiwa, yang terdiri dari 1.300 laki, dan 1.195 wanita, semuanya tergabung menjadi 102 kepala keluarga. Sebagian besar penduduknya terdiri dari suku Dayak Bedayuh. Mata pencaharian sehari-hari penduduk adalah sebagai pedagang, pengrajin anyaman rotan, berkebun dan bekerja di jasa angkut. Pada tataran akses informasi, dan pola komunikasi mereka lebih bersikap ambivalensi. Meski mereka berada di wilayah Indonesia, tetapi pola komunikasi dan opini yang terbangun sehari-hari lebih cenderung pada isu sosial, ekonomi dan budaya Malaysia. Hal ini terkait dengan pola komunikasi, dan kinerja lembaga-lembaga komunikasi formal, maupun informal di Desa Jagoi (Monografi Desa Jagoi, 2012).

Pola Komunikasi: Komunikasi formal yang dikonstruksi oleh para tokoh formal setempat, sedangkan komunikasi informal yang dikonstruksi oleh para tokoh masyarakat (tokoh agama, pemangku adat, kepala suku, dan tokoh masyarakat lainnya). Pola komunikasi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Desa Jagoi, adalah komunikasi individual. Di Desa Jagoi yang tampak paling menonjol adalah peran tokoh informal, ketimbang tokoh

formalnya. Misalnya ketika radio komunitas “Baresta” mengalami gangguan teknik/kerusakan tidak ada kepedulian dari para tokoh formalnya. Untuk mengatasinya hal tersebut mereka meminta sumbangan warga untuk perbaikan. Pada hal radio komunitas tersebut merupakan satu-satunya yang dimiliki Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, sebagai sarana sosialisasi kebijakan, pemerintahan setempat.

Persoalan perizinan siaran radio komunitas tersebut hingga penelitian ini dilakukan masih belum selesai, dengan alasan terkendala masalah dana. Radio Bareta sebagai radio komunitas menurutnya tidak bisa menghasilkan uang, karena tidak boleh beriklan. Mereka hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah, atau donator masyarakat. Kurang terbangunnya pola komunikasi secara internal, di Desa Jagoi, berdampak pada terganggunya operasional Radio komunitas, dan lembaga komunikasi sosial lainnya. Padahal budaya gotong royong di Desa Jagoi masih kental, dan menjadi ikon masyarakatnya. Ketika Desa Jagoi dipilih menjadi desa informasi, dan diresmikan pada tanggal 11 November 2011, desa tersebut masih belum ada persiapan, infrastruktur, dan sumber daya masyarakat untuk melaksanakannya. Meski demikian sebenarnya ada potensi yang bisa dikembangkan, misalnya keinginan masyarakat untuk berubah, dengan menggunakan peralatan teknologi, yang dimotori kalangan pemuda di Desa Jagoi cukup menonjol. Ada keinginan kuat masyarakat untuk memiliki perangkat TIK, yang bisa mengakses informasi melalui jaringan internet, untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa Jagoi sendiri. Keinginan masyarakat itu tidak mendapat sambutan pemerintah lokal setempat, sehingga kandas di tengah jalan.

Akses Informasi: Saat ini masyarakat mendapatkan informasi tentang kebijakan pemerintah dari pejabat formal setempat. Sedangkan akses informasi dari media massa Indonesia sangat terbatas. Akses informasi banyak didominasi media massa dari Negara Serawak Malaysia. Minimnya akses

informasi dari negeri sendiri berdampak pada masalah sosial, budaya, pendidikan dan pola komunikasi masyarakat yang bermukim di Desa Jagoi sebagai wilayah perbatasan (Mijen, 4/10//2013). Realitasnya masyarakat yang tinggal di perbatasan selalu berorientasi pada kebijakan dan aturan Negara Malaysia, dan kurang mengapresiasi kebijakan pemerintah. Media massa dan budaya asing selama ini telah membentuk karakter masyarakat perbatasan seperti itu. Mereka cenderung lebih tunduk dan menganut sistem kebijakan yang dilakukan Malaysia, meski hal itu bersifat ilegal. Dampaknya respon masyarakat perbatasan terhadap bentukan lembaga komunikasi Pemerintah Indonesia termasuk desa informasi relatif rendah. Mereka tidak partisipasif, karena tidak ada sosialisasi, sehingga wadah sarana berdiskusi bagi warga masyarakat di Desa Jagoi tidak ada, kecuali radio komunitas Baresta.

Rendahnya partisipasi masyarakat Desa Jagoi untuk melakukan pertemuan/ diskusi, lebih dominan disebabkan mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, untuk mencari nafkah hidup keluarga. Apalagi jika diskusi atau pertemuan semacam itu dilakukan pada siang hari. Sementara desa informasi hingga penelitian ini dilakukan masih dalam impian, dan belum terbentuk. Lembaga komunikasi seperti Kimtas, lembaga sosial keagamaan meski telah terbentuk masih belum banyak berperan. Lembaga itu umumnya sebatas papan nama, tetapi sebenarnya tidak ada. Padahal keterlibatan tokoh formal maupun informal untuk menggalang akses informasi, maupun mengawal proses pembangunan desa, sangat penting. Keterlibatan para tokoh masyarakat untuk pembangunan pemerintah lokal (kecuali keagamaan), di Desa Jagoi terkalahkan oleh pekerjaan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan dasar perekonomian mereka. Hal tersebut sangat kontras dengan kegiatan sosial keagamaan. Untuk masalah tersebut rasa kegotong-royongan mereka cukup tinggi.

Pada konteks lokalitas pemangku adat atau tokoh agama lebih dipercaya daripada pejabat formal dari unsur pemerintahan, dalam

hal tertentu. Padahal gagasan desa informasi menyaratkan terintegrasinya semua komponen dan potensi sumber daya masyarakat perbatasan. Bicara sumber daya masyarakat perbatasan di Desa Jagoi, banyak hal yang masih menjadi tantangan para pengambil kebijakan. Contohnya meski di Desa Jagoi sebagai pintu masuk utama ke Negara Serawak Malaysia, dan sedang dibangun rencana sentral bisnis di “border” tersebut, keterlibatan masyarakat lokal dapat dikatakan sangat minoritas. Kegiatan pembangunan maupun sarana bisnis yang akan dioperasikan di perbatasan itu banyak didominasi orang luar (baik orang Jakarta, maupun Malaysia) yang ingin menanamkan pengaruh bisnisnya di lokasi itu.

Kasus di Desa Jagoi

Misteri kasus di Desa Jagoi, yang terletak di wilayah perbatasan hingga kini masih belum banyak terpecahkan. Isu krusial wilayah perbatasan itu menyangkut berbagai aspek, aspek sosial, budaya, komunikasi, dan ekonomi. Dari pengaruh berbagai aspek tersebut berdampak pada sikap dan perilaku masyarakat Desa Jagoi yang tinggal di wilayah perbatasan.

Aspek Sosial, dan Budaya : Pada aspek sosial, apresiasi masyarakat terhadap kebijakan dan program-program pemerintah mereka tanggap kurang serius. Masyarakat perbatasan selalu membandingkan dengan keberhasilan Malaysia dalam pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan. Misalnya sarana dan prasarana transformasi, pembangunan infrastruktur jalan, media komunikasi dan lainnya. WNI di Malaysia umumnya hidupnya lebih sejahtera, daripada WNI yang tinggal di wilayahnya sendiri. Di bidang pendidikan lebih maju di Malaysia, daripada di Indonesia perbatasan. Implikasinya banyak masyarakat Indonesia di perbatasan yang memilih menyekolahkan putra/ putrinya di Malaysia. Misalnya seorang guru ngaji di Malaysia, menerima bayaran lebih tinggi daripada di Indonesia. Maka banyak guru ngaji di wilayah Jagoi bekerja di Negara tetangga itu. Jika di

Desa Jagoi guru ngaji tidak dibayar atau hanya untuk amal saja, di Malaysia mereka menerima gaji tetap melebihi gaji guru PNS di Desa Jagoi. Kehidupan sosial di Malaysia dihargai tidak seperti di Indonesia (Ahau, 4/10/2013).

Aspek Informasi dan Komunikasi: Dari pengakuan masyarakat di perbatasan (informan) mayoritas informasi dari media massa, mereka dapatkan dari Malaysia. Misalnya siaran televisi, radio, serta informasi informal dari masyarakat perbatasan. Dominasi informasi yang berasal dari Negara tetangga tersebut juga berdampak pada pemahaman budaya di masyarakat, khususnya di bidang pendidikan anak-anak sekolah. Menurut Mijen (2013), anak sekolah di wilayah perbatasan lebih banyak mengenal budaya Malaysia, daripada budayanya sendiri. Jika ditanya siapa presiden kita, mereka menjawabnya, Moch. Badawi, bukan Susilo Bambang Yudhoyono. Fenomena seperti itu menunjukkan bahwa dampak akses informasi sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan dan kebudayaan.

Potensi jangkauan, dan daya tarik program televisi dan radio Malaysia mampu mengonstruksi karakteristik sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang tinggal di desa perbatasan. Keberadaan radio komunitas Baresta, satu-satunya yang dimiliki warga Desa Jagoi, kondisinya sudah kurang sehat, hanya pada hari tertentu melakukan siaran, setelah rusak disambar petir beberapa bulan lalu. Kalah dengan radio Malaysia yang memiliki kekuatan dan program siaran lebih menarik, banyak diminati para pendengarnya di Desa Jagoi, yang wilayahnya berbatasan dengan Malaysia. Radio Malaysia memiliki sinyal yang begitu kuat dan ia mampu mengganggu frekuensi radio komunitas yang ada di Desa Jagoi tersebut. Belum lagi acara TV 3 Malaysia yang banyak digemari oleh masyarakat perbatasan. Malaysia sengaja membangun kawasan perbatasan dengan meningkatkan akses informasi, dan ekonomi agar masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan dapat dipengaruhi kehidupan sosial budaya, dan perekonomiannya (Ahau, 4/10/2013).

Aspek Ekonomi Masyarakat: Dari sejumlah 3.000 jiwa penduduk Desa Jagoi sekitar 70% masyarakatnya merupakan petani ladang berpindah. Artinya mereka bukanlah petani yang memiliki ladang sendiri, tetapi mayoritas sebagai buruh tani, sedangkan ladang yang mereka tanami sebagian besar milik tuan tanah/ orang lain dari luar daerah, pejabat setempat, termasuk orang-orang kaya dari Malaysia. Para petani (buruh tani) yang berkebun di lahan tuantanah itu umumnya mereka yang diberikan kepercayaan untuk menjaga lahan yang bersangkutan. Sebagai imbalannya mereka diberikan hak untuk berkebun di sebagian lokasi tanah yang mereka jaga, selebihnya berupa hutan dan semak-belukar. Selebihnya sekitar 10% masyarakat Desa Jagoi memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta/atau bergerak di perdagangan sektor informal seperti bisnis kuliner, toko kelontong, sembako, pengrajin, dan lainnya.

Sementara 20% lainnya sebagai pegawai negeri, swasta dan pekerja di Malaysia. Data monografi di kantor Desa Jagoi mencatat tingkat kemiskinan pada tahun 2011 mencapai 70%. Masyarakat di perbatasan memiliki tingkat ketergantungan yang signifikan dengan Negara Malaysia. Misalnya hampir semua kebutuhan rumah tangga masyarakat perbatasan (sembako, gas elpiji, barang kelontong, minuman kaleng, dan berbagai komoditas lainnya) disuplai Malaysia. Di Malaysia harga barang-barang tersebut lebih murah dibandingkan dengan kota Pontianak, dan Singkawang. Barang-barang komoditi ber-merk produk Malaysia itu terpampang hampir di semua toko-toko di sepanjang jalan lintas perbatasan Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang. Satu-satunya produk masyarakat Desa Jagoi yang terkenal adalah kerajinan tangan, *bumbu*, *takin*, dan *bidai*, yang diproduksi secara *home industry* di Desa Jagoi. Tetapi karena di Jagoi tidak ada pembelinya, mereka menjualnya di pasar Sirikin, distrik Bauk Malaysia, sekitar 15 Km dari wilayah perbatasan. Di pasar tersebut barang-barang kerajinan asal Indonesia ditampung oleh para

broker dan diberikan hak paten Malaysia. Oleh para broker produk kerajinan masyarakat Jagoi dibeli dengan harga murah, dan setelah mereka beri merk hak paten dijual berlipat-ganda, termasuk diekspor ke berbagai Negara di Asia, dan Eropa.

Aspek Politik Lokal: Dilihat dari aspek politik banyak terdapat ketidakseimbangan perlakuan baik masyarakat Indonesia di perbatasan maupun yang bekerja di Malaysia. Pada satu sisi masyarakat Indonesia yang bekerja di wilayah Malaysia diberikan upah lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah Indonesia perbatasan. Tetapi pada sisi lain masyarakat kita di sana lebih di-“perbudak” (meski tidak secara terus-terang), artinya para pekerja (warga negara Indonesia) di wilayah Malaysia perbatasan diperlakukan kurang seimbang dilihat dari hak asasi manusia. Misalnya sebutan sehari-hari dengan istilah “orang indon” mengandung makna negatif bagi warga negara Indonesia yang bermukim di Malaysia perbatasan. Sebutan itu bukan sekedar bermakna orang Indonesia secara harfiah, tetapi bisa berkonotasi sebagai ungkapan yang bermakna, cibiran, penghinaan, bahkan bentuk lain dari pembedaan kelas, bahwa istilah indon dapat ditafsirkan bodoh, dungu, bego, dan sejenisnya. Perlakuan seperti itu banyak dialami oleh para pekerja perkebunan sawit di Malaysia. Mereka sudah kebal dengan istilah itu, dan kurang meresponnya, bagi mereka pemenuhan kebutuhan ekonomi lebih utama, daripada mempermasalahkan sebutan *indon* bagi kelompok pekerja kebun sawit dan para TKI di sekitar perbatasan Malaysia. Jika ada warga Indonesia yang membuat kesulitan di wilayah Malaysia, akan dikucilkan secara sosial dan ekonomi. Para pekerja itu tidak mau ribut hanya gara-gara sebutan *indon* oleh rekan kerjanya. Jika mereka membuat keributan, maka pekerja Indonesia akan dipecat dari pekerjaannya, buktinya sudah banyak (Suhadi, 5/10/2013).

Sumber Daya Masyarakat: Pada setiap organisasi pemerintahan desa, sumber daya masyarakat memiliki posisi strategis baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, politik,

dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya masyarakat merupakan cermin potensi pemerintah desa, apakah mereka memiliki kemampuan untuk berkompetisi, atau tidak dalam kemajuan teknologi saat ini. Dalam konteks penelitian ini sumberdaya masyarakat diasumsikan menjadi

indikator penting untuk menjadi sebuah desa informasi. Peta sumber daya masyarakat sekaligus dapat digunakan sebagai pengukuran, keunggulan, atau kekurangan seandainya desa yang bersangkutan mendapatkan bantuan perangkat teknologi untuk pengembangan desa informasi, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Potensi Sumber Daya Masyarakat Desa Jagoi

No	Indikator Desa Informasi	Potensi Desa Jagoi Sebagai Objek Penelitian Studi Kasus	Keterangan
01	Komitmen kades/ lurah terhadap pengembangan desa informasi	Komitmen untuk pengembangan desa informasi masih relatif rendah, dalam keseharian ia sibuk dengan urusan pekerjaan di bengkel mobil Truk miliknya, sehingga jarang berada di Kantor Desa, untuk urusan warga dilayani di rumah sekaligus tempat usaha	Untuk pengembangan desa informasi di perbatasan peran dan komitmen pemimpin, Lurah/ Kades/ Camat/ tokoh masyarakat sangat menentukan
02	Potensi jaringan infrastruktur akses internet	Jaringan infrastruktur internet (Telkomsel, indosat) ada dua BTS di desa tersebut, tetapi pada lokasi tertentu di dekat perbatasan tidak ada sinyal	Di perbatasan terjadi sinyal HP roaming, oleh jaringan dari Malaysia, masyarakat di perbatasan umumnya menggunakan HP pada waktu telpon saja dan sesudahnya HP dimatikan
03	Suplai energi listrik dari PLN	Jaringan energi listrik tidak stabil, sering mati dan bergilir, masyarakat perbatasan banyak yang menggunakan generator, meski BBM-nya terhitung mahal	PLN sering padam, dan bergiliran setiap malam, hal ini menurut warga sangat mengganggu akses informasi (TV, Radio, Internet) dan mengganggu peralatan elektronik rumah tangga lainnya
04	Kepemilikan komponen desa informasi (Desa Dering, TV berjaringan, PLIK, MPLIK, Kimtas	Hanya radio komunitas, bantuan mahasiswa Univ.Tanjung Pura waktu KKN 2012, tetapi jarang siaran, hanya waktu tertentu saja. Penyiar banyak yang kerja, kalau malam banyak yang mengaku sudah capek, sehingga malas siaran.	Kehadiran radio komunitas sangat dibutuhkan warga masyarakat. Selama ini banyak memperoleh informasi dan hiburan dari media (TV dan radio Malaysia)
05	Potensi sumber daya masyarakat desa yang dimiliki	Hasil pertanian, perkebunan, kerajinan tangan yang dibudidaya oleh warga masyarakat desa setempat	Khusus produk kerajinan yang menjadi ikon masyarakat Jagoi (Bidai dan bumbu) justru dikuasai oleh para tengkulak Malaysia. Bahkan kedua produk kerajinan itu dipatenkan oleh tengkulak di Pasar Sirikin Malaysia.
06	Kesiapan SDM masyarakat untuk mendukung gagasan pengembangan desa informasi	Akses informasi melalui jaringan internet, dan pemahaman terhadap komputer/ TIK hanya didominasi kalangan pelajar/ remaja, PNS, dan karyawan tertentu. Sedangkan masyarakat secara umum tidak memahami TIK/ internet sebagai persyaratan desa informasi	SDM untuk pengembangan desa informasi di Desa Jagoi masih tampak belum siap, maka perlu diberdayakan, melalui pelatihan, lokakarya, dan sejenisnya.
07	Apresiasi/ respon masyarakat terhadap gagasan pengembangan desa informasi	Masih ada perbedaan pandangan antara tokoh formal, dan nonformal karena adanya pengaruh informasi yang terbangun dari media Negara Malaysia	Masyarakat Desa Jagoi secara umum masih belum paham terhadap gagasan pengembangan desa informasi
08	Permasalahan krusial yang terkonstruksi di komunitas masyarakat Desa Jagoi	Desa Jagoi dijadikan pintu gerbang penyelundupan barang-barang ilegal dari Negara lain, disamping dampak informasi media dan budaya asing yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat di desa perbatasan tersebut	Menjadi faktor pengaruh terhadap gagasan pengembangan desa informasi di perbatasan

Sumber : data penelitian diolah

Tabel 1 menunjukkan potret kondisi riil sumber daya masyarakat Desa Jagoi, di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Dari kondisi masyarakat tersebut dapat dipetakan, hal seperti apa yang harus dilakukan jika

desa informasi harus diimplementasikan di desa perbatasan termasuk Desa Jagoi. Hal ini menunjukkan desa di sekitarnya tidak jauh berbeda kondisinya.

Respon Masyarakat

Setiap program kebijakan pembangunan/bantuan apapun bentuknya yang digunakan untuk kepentingan publik idealnya bukan hanya diputuskan oleh pejabat formal yang diberikan kewenangan untuk memutuskannya. Pada level pemerintahan di desa misalnya komunitas desa yang bersangkutan juga memiliki kontribusi yang sama. Di samping itu secara informal masih ada tokoh informal, seperti tokoh Agama, pemangku adat, kepala suku, dan lainnya. Mereka juga memiliki kontribusi terhadap pembangunan sebuah desa. Keputusan yang berkualitas di tingkat desa jika merupakan hasil musyawarah di antara mereka. Keputusan itu akan bulat jika objek yang dibahas dalam forum memiliki segi manfaat untuk kepentingan umum/ masyarakat desa. Begitu sebaliknya jika segi manfaat itu kurang, bukan tidak mungkin keputusannya akan “lonjong”, bahkan tidak bisa mengambil keputusan sama sekali. Hal ini juga berlaku untuk gagasan pengembangan desa informasi di desa perbatasan. Sikap itu dapat juga dibaca dari respon para narasumber FGD yang diundang untuk mendiskusikan kajian penelitian ini di Desa Jagoi pada 4 Oktober 2013 malam. Masyarakat Desa Jagoi pada dasarnya senang untuk berdiskusi, terlebih jika yang dibahas berkaitan dengan pembangunan desa dan masyarakatnya.

Hanya saja diperlukan waktu yang tepat untuk mengondisikan pertemuan seperti itu. Seperti halnya pada FGD ini yang diundang sebetulnya hanya 10 tokoh masyarakat, tetapi yang hadir ketika itu 42 masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Jagoi terhadap gagasan pengembangan desa informasi hanyalah pada masalah sosialisasi. Hampir tidak pernah masyarakat diberikan informasi tentang kebijakan pembangunan. Pejabat formal setempat mengeluh jika diundang rapat, atau pertemuan desa jarang yang hadir. Memang permasalahannya di siang hari mereka bekerja untuk kebutuhan

rumah tangga sehari-hari. Ada yang bertani, berkebun, menjadi buruh sawit, berjualan di pasar dan lainnya. Namun demikian rata-rata lokasi kegiatan mereka bukan di wilayah Indonesia, tetapi di Malaysia. Di Negara Malaysia, baik harga, gaji, upah, lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia. Buktinya FGD di malam hari masyarakat banyak yang datang sampai selesai acara. Respon mereka terhadap gagasan pengembangan desa informasi di perbatasan dapat diklasifikasikan dalam pengelolaan lembaga komunikasi/media lokal yang digunakan sebagai publikasi pembangunan desa. Klasifikasi pendapat mereka seperti tercermin dalam Tabel 2 .

Tabel 2 menggambarkan bahwa pada tataran sikap dan keinginan masyarakat Desa Jagoi memiliki respon positif dan antusias terhadap gagasan desa informasi. Tetapi ketika dilihat dari sumberdaya masyarakat yang masih kurang memenuhi persyaratan untuk mengelolanya persoalannya akan lain. Desa informasi dikonsepsikan untuk diawaki oleh mereka yang paham dengan TIK dan internet. Di Desa Jagoi potensi itu ada di kalangan remaja yang masih labil, dan belum memiliki pekerjaan tetap. Kemungkinan pindah ke kota lain baik untuk melanjutkan jenjang pendidikan, maupun mencari pekerjaan masih cukup terbuka luas. Sementara dari kalangan masyarakat umum, banyak yang tidak paham terhadap TIK, hal ini sangat riskan jika desa informasi dikelola masyarakat yang tidak memiliki pemahaman terhadap TIK dan internet. Respon masyarakat baru merupakan titik awal untuk menjajaki bagaimana jika desa informasi dilaksanakan di Desa Jagoi, yang wilayahnya berada di perbatasan. Jadi respon masyarakat Desa Jagoi yang positif belum bisa menjadi jaminan seandainya desa informasi dibangun di sana. Masih ada keterkaitan aspek lainnya yang menjadi *supporting* atas berdirinya desa informasi. Bagaimana sumber daya masyarakatnya, potensi apa yang dimiliki desa tersebut sehingga memiliki produk keunggulan tertentu. Artinya produk lokal akan menjadi

magnet daya tarik untuk dijadikan sebuah desa informasi. Komponen selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan informasinya. Dalam konteks desa informasi, posisi informasi menjadi sumber kapital yang diharapkan dapat membuahkan nilai tambah bagi masyarakat desa yang bersangkutan. Jika pengelolaan informasi tidak mampu meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Desa Jagoi, maka

masyarakat akan kecewa, dan semakin tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah. Maka dalam konsep desa informasi antara infrastruktur, kelembagaan informasi, sumber daya masyarakat dan komponen lainnya sudah harus memiliki jejaring yang saling mendukung. Tanpa adanya *link* tersebut akan semakin sulit untuk mengelola sebuah desa informasi yang profesional.

Tabel 2. Respon Masyarakat Terhadap Gagasan Pengembangan Desa Informasi

No	Indikator Komponen Desa Informasi	Respon Masyarakat Desa Jagoi terhadap Gagasan Pengembangan desa Informasi di Perbatasan	Keterangan
01	Seandainya ada bantuan PLIK/ MPLIK/ Desa Punya Internet, untuk pengembangan desa informasi	Jika ada program pemberian bantuan apapun namanya seperti PLIK/ MPLIK di Desa Jagoi, Kec. Jagoi Babang, akan menerimanya dengan baik asal diberikan pelatihan, dan mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat	Selama ini belum pernah ada bantuan peralatan-peralatan TIK/ internet tersebut
02	Bantuan paket telepon untuk Desa Bordering di Desa Jagoi	Pernah ada dipasang di rumah Kades, tapi sekarang sudah tidak digunakan dan sambungan terputus. Masyarakat enggan menggunakan, karena jauh dan merasa tidak enak/sungkan dengan Pak Kadesnya	Masyarakat lebih suka menggunakan HP
03	Bantuan TV Berjaringan di Desa Jagoi	Desa Jagoi pernah mendapat bantuan TV berjaringan tahun 2010, hanya bertahan sekitar empat bulan, setelah rusak tidak ada yang bisa memperbaiki, dan sekarang sudah tidak ada. Waktu itu acara yang paling sering dilihat : lawak, OVJ, berita, musik, film/ sinetron. Informasi yng bersifat pembangunan jarang muncul di TV	Masyarakat memilih nonton TV sendiri di rumah masing-masing
04	Bantuan Radio Komunitas (Rakom) di Desa Jagoi	Rakom Baresta, satu-satunya radio komunitas bantuan mahasiswa Univ.Tanjung Pura ketika melakukan program kuliah kerja nyata (KKN), sedangkan antene bantuan dari Telkom. Tetapi sayangnya siaran rakom tersebut tersendat, karena masalah SDM penyiarnya, dan jam siarannya, akhirnya tidak efektif	Pengelola kesulitan mencari biaya operasional, dan penyiar siang hari
05	Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Sudah terbentuk KIM, tetapi tidak aktif karena program dan organisasinya tidak jelas. Karena kerja sosial aktif jika ada event tertentu, selanjutnya tidak ada kegiatan sama sekali	Kurang termotivasi segi pemanfaatannya

Sumber : data lapangan diolah

Faktor Yang Berpengaruh

Komponen Yang Dibutuhkan: Beberapa persyaratan penting yang perlu dipersiapkan untuk pengembangan desa informasi di antaranya, (1). Komitmen pejabat lokal (Kades/ Lurah/ Camat/ Bupati/ Walikota)

terhadap pemberdayaan masyarakat desa dalam kerangka pengembangan desa informasi. (2). Adanya kerja sama pengelola infrastuktur jaringan informasi dengan pemerintahan lokal di desa dan kecamatan kabupaten/ kota setempat. (3). Terdapatnya

kesiapan sumber daya manusia di komunitas desa, dan ketersediaan para agen perubahan (relawan TIK) di desa yang menjadi sasaran pembentukan desa informasi. (4). Adanya sumber pendanaan lokal yang bisa digunakan untuk membiayai operasional pengembangan desa informasi. Agar desa informasi bisa mandiri sebaiknya sumber dana diperoleh dari usaha mandiri di komunitas desa yang bersangkutan. (5). Adanya dukungan para tokoh masyarakat, yang tergabung dalam lembaga komunikasi sosial seperti (KIM, PKK, Lembaga Sosial Keagamaan) dan lainnya yang aktif berpartisipasi terhadap pembangunan desanya. (6). Ada produk unggulan tertentu yang menjadi ikon. Artinya ia memiliki nilai ekonomi tertentu untuk menjadi *core* bisnis desa informasi, yang dikelola secara *e-commerce*. Namun realitasnya ketika mengakses informasi melalui internet, kendalanya adalah mahalnya harga pulsa, keterbatasan *bandwith*, kualitas layanan operator, kemampuan masyarakat (pengetahuan) untuk mengakses berbagai fitur di media maya, konten informasi maupun bahasa (inggris) dan lainnya. Sebagian besar masyarakat Desa Jagoi tidak begitu paham tentang persoalan teknologi tersebut. Mereka mengoperasikan alat komunikasinya, baik PC, Android, *handphone* hanya berdasarkan intuisi, atau *feeling*. Meski mereka memiliki alat komunikasi yang canggih, dilihat dari segi penggunaan fungsinya tidak optimal, sehingga sebenarnya terjadi pemborosan. Pengembangan desa informasi perlu dipahami bersama bahwa penggunaan alat teknologi komunikasi dalam konteks tersebut bukanlah untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Tetapi sudah harus yang bersifat produktif dan menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat penggunanya. Jika paradigma penggunaan alat komunikasi tidak mengarah pada yang bersifat produktivitas, kemungkinan gagal pengembangan desa informasi peluangnya lebih besar.

Sebuah desa informasi perlu adanya dukungan baik secara individu dari para tokoh

masyarakat, maupun secara kelembagaan yang tergabung dalam organisasi atau lembaga komunikasi lokal, di desa yang bersangkutan. Kerja sama di antara mereka diperlukan untuk mendukung eksistensi desa informasi. Kerja sama desa informasi bisa dilakukan dengan kalangan perguruan tinggi, perusahaan swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat setempat. Mereka dapat dijadikan partner kerja untuk bidang advokasi dan pengembangan organisasi, karena di sana banyak intelektual yang masih memiliki idealisme tinggi yang berpihak kepada komunitas masyarakat. Kolaborasi diperlukan dengan pihak pemerintah setempat, misalnya Dishubkominfo Kabupaten/Kota, hingga sampai ke pemerintah desa untuk memberikan jaminan dari segi pembiayaan operasionalnya. Sedangkan kerja sama dengan operator telekomunikasi untuk akses jaringan informasi (internet). Suatu hal yang tidak kalah pentingnya kerja sama dengan kelompok informasi masyarakat perbatasan (Kimtas). Lembaga komunikasi yang terakhir ini memiliki peran penting, di mana biasanya para tokoh masyarakat berada di sana. Mereka biasanya memiliki kepedulian untuk memajukan desanya. Merekalah yang memiliki kepekaan sosial dan mengerti kebutuhan konten informasi di desa informasi.

Dalam konteks ini kebutuhan dan pengelolaan informasi menjadi persoalan dasar yang harus terpenuhi. Pengelolaan informasi bukan hanya sebatas informasi yang dibutuhkan oleh desa informasi, tetapi juga menyangkut proses dan penerapannya. Mengelola informasi dalam organisasi kelembagaan memerlukan keterampilan khusus. Keterampilan itu tidak datang sendirinya, tetapi diupayakan agar keterampilan khusus pengelola informasi dapat memberikan manfaat, baik untuk lembaga dan masyarakat secara umum. Lembaga pengelola informasi perlu memiliki visi dan misi yang jelas untuk apa informasi itu mereka kelola, dan siapa penggunanya. Jika pengelolanya adalah desa informasi maka perlakuan itu juga berlaku padanya. Belajar dari Desa Jagoi yang

dipilih sebagai studi kasus, permasalahan perbatasan terlalu luas untuk dijadikan beban bagi desa yang kebetulan wilayahnya berada di perbatasan. Permasalahan perbatasan merupakan masalah Negara yang ber-skop nasional, yang memerlukan kebijakan pada level nasional pula. Sedangkan desa hanya memiliki kewenangan yang terbatas di bawah koordinasi camat. Maka permasalahan yang menjadi topik diskusi dalam penelitian ini hanya persoalan yang bertautan dengan level pemerintah desa dan kecamatan, meski lokasinya berada di wilayah perbatasan.

Pembahasan Data Penelitian

Dilihat dari perspektif ontologis, nama desa informasi masih mengandung pengertian ganda bahkan bersifat paradoks dengan realitas saat ini. Popularitas namanya paradoks dengan fungsi dan pemanfaatannya. Pasca reformasi 1998, ketika masyarakat dan lembaga organisasi, media, lembaga pemerintah, dan lembaga lainnya mendapatkan ruang kebebasan hampir semuanya bersikap laah menginterpretasikan kebebasan itu. Misalnya, pada level penamaan desa: (desa miskin, desa tertinggal, desa sembada, desa swasembada, desa sehat, desa mandiri, desa wisata, desa beriman, desa punya internet, desa informasi) dan masih banyak penamaan desa yang salah kaprah lainnya. Setiap penamaan suatu benda (abstrak dan konkret) mengandung makna yang mencirikannya (Barthes, 1997). Desa informasi dapat diinterpretasikan dan dimaknai menjadi salah satu komponen untuk menuju masyarakat informasi.

Masyarakat informasi secara politis dikonsepsikan sebagai masyarakat yang berdemokrasi. Secara budaya sebagai masyarakat yang memanfaatkan informasi untuk memenuhi kebutuhan lokalnya. Secara ekonomi, merupakan masyarakat yang pertumbuhan ekonominya berbasis informasi, dan ilmu pengetahuan (Ibrahim, 2011). Maka

nama desa informasi dapat dianalogikan, sebuah desa yang masyarakatnya dalam perilaku kehidupan sehari-harinya memiliki ketergantungan dengan informasi. Hakikatnya berani memberi nama harus bertanggung jawab atas segala konsekuensinya, termasuk yang dibahas dalam kajian penelitian ini. Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka tesis pelabelan program pemerintah yang hanya bernuansa proyek yang mengarah pada kepentingan tertentu, tetapi dibungkus dengan memberikan kesejahteraan masyarakat semakin mendekati realitas. Ada kemungkinan jika terminologi ini yang digunakan kondisi paradoksnya cenderung semakin menguat. Pada terminologi tersebut antara pemaknaan dan konsep implementasinya tidak bisa berjalan secara paralel. Implikasinya ketika peneliti hendak merumuskan definisi tentang desa informasi mengalami kesulitan. Pada tataran kebijakan “desa informasi” dimaknai dengan proyek bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, berupa (PLIK, MPLIK, Radio Komunitas, TV Berjaringan, Desa Dering/ Desa Pinter, Pembentukan KIM) pada desa tertentu yang dipilih. Pendekatannya bukan di titik beratkan pada kualitas akses informasi melalui peralatan tersebut yang memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat desa. Tetapi pada kuantitas seberapa banyak (titik) yang telah diperbantukan, kepada desa-desa di Indonesia. Jika misalnya pada tahun 2014 target desa informasi di Indonesia sebanyak 500 desa terpenuhi. Maka tidak bisa dibaca sebagai 500 desa di Indonesia yang masyarakatnya memiliki ketergantungan dengan informasi dalam pola kehidupannya sehari-hari. Tetapi membacanya sampai tahun, 2014, sebanyak 500 proyek bantuan perangkat teknologi informasi melalui proses lelang dengan pihak ketiga telah tercapai. Ini bukan berarti menilai kebijakan bantuan itu tidak baik, tetapi dalam konteks pemberian makna “desa informasi” untuk pendefinisian konsepnya yang masih bersifat ambivalensi. Ketika kita mendengarkan desa informasi di wilayah

perbatasan, seperti kajian penelitian ini, maka yang ada dalam alam pikiran kita tentu betapa rumitnya desa perbatasan. Tetapi sebagaimana telah dibahas di bagian lain, bahwa persoalan perbatasan merupakan permasalahan Negara dalam level nasional, sehingga pembahasan desa informasi ini dibatasi, dan tidak sampai menyentuh ke arah sana. Desa Jagoi, dipilih sebagai studi kasus karena memiliki keunikan. Bagaimana karakteristik objek penelitian dilihat dari aspek sosial, budaya, ekonomi, pengetahuan dan lainnya. Komponen-komponen tersebut berpengaruh terhadap komponen lain dalam konteks pengembangan desa informasi di Desa Jagoi.

Ciri khas struktur sosial, dan budaya masyarakat Desa Jagoi berelasi dengan kebijakan lokal yang diputuskan oleh pejabat formalnya. Demikian juga aspek perekonomian, dan politik lokal di desa yang bersangkutan. Sementara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki bertautan dengan tingkat pendidikan formal sumber daya masyarakat di desa tersebut. Desa Jagoi, yang masuk kategori desa tertinggal, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian ladang berpindah, dan perkebunan. Selebihnya warga masyarakat Desa Jagoi umumnya berdagang, bekerja di perkebunan sawit dan menjadi TKI di Serawak, Malaysia. Hanya sebagian kecil yang bekerja di sektor swasta, dan pengrajin anyaman dari rotan, yakni *bidai*, *tokin* dan *bumbu* di Desa Jagoi sendiri. Industri kerajinan inilah yang mereka andalkan sebagai produk unggulan di Desa Jagoi. Tetapi pemasarannya harus ke pasar Sirikin Malaysia, bahkan oleh broker di Malaysia sudah dipatenkan dan dijual setingkat produk ekspor. Dari berbagai uraian tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa desa informasi bukan sekedar penamaan yang dititikberatkan pada kuantitas bantuan peralatan. Betapapun canggih dan modern peralatan teknologinya, jika tidak dipersiapkan konten dan sumber daya masyarakatnya program tersebut akan gagal. Pengelolaan desa informasi diperlukan konsep yang matang, bukan sekedar mengejar

target penganggaran. Persiapan perlu dimulai sedini mungkin, filosofinya lebih baik terlambat daripada target terpenuhi tetapi tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Semua komponen itu harus terintegrasi, dan mempunyai visi, filosofi dan tujuan yang jelas, dan memiliki *output* untuk kepentingan masyarakat penggunaannya. Terintegrasi artinya kepentingan penggunaannya yang diutamakan, bukan kepentingan yang lain yang terindikasikan saling berebut demi kepentingan tertentu.

Nuansa itu tercermin ketika pengumpulan data kualitatif, di mana setiap masalah tidak terselesaikan dengan elegan, dan saling melempar tanggung jawab dengan yang lainnya. Hal itu dapat diasumsikan ada tarik-menarik, berdasarkan kepentingan/ego sektoral tertentu. Kondisi seperti itu terjadi karena antara visi, filosofi dan tujuan desa informasi tidak jelas. Implikasinya penentuan lokasi desa informasi menjadi tidak tepat sasaran. Konsep desa informasi, seharusnya dirancang secara komprehensif (utuh), tidak diartikan secara parsial. Desa informasi merupakan terintegrasinya berbagai komponen, sehingga menghasilkan sebuah produk. Ketika desa informasi hanya dimaknai dari aspek salah satu komponennya, dan tidak adanya persiapan sumber daya masyarakat yang akan mengelolanya maka sejatinya bukan nama kelembagaannya (desa informasi), tetapi sebatas proyek bantuan alat teknologi pada desa yang dipilihnya. Proses ini seolah telah menjadi mitos, yakni kondisi menyimpang yang dianggap biasa dan dilegalkan. Sementara pendekatan yang digunakan pada pembentukan/ bantuan desa informasi lebih dominan bernuansa proyek, yang bersifat *top-down approach* kepada desa yang dipilihnya. Di era otonomi daerah pendekatan semacam itu sudah tidak populis, seperti di era Orde Baru.

Namun demikian menggunakan pendekatan *bottom-up approach* murni juga akan kehilangan pengawasannya.

Sekiranya yang lebih baik adalah jalan tengah penggabungan di antara keduanya. Dengan demikian masyarakat memiliki hak untuk ikut berperan dalam pengambilan keputusan, dan negara/ pemerintah pihak pemilik sumber dana bisa melakukan pengawasan sesuai dengan porsi kewenangannya. Sebagai lembaga publik sudah seharusnya desa informasi dikelola untuk pemberdayaan masyarakatnya. Di mana masyarakat memiliki peran aktif dan berpartisipasi dalam operasional desa informasi yang bersangkutan. Maka di awal pembentukannya respon masyarakat memegang kunci utama, atas keberlangsungannya. Respon masyarakat terhadap gagasan pengembangan desa informasi di lokasi penelitian memang tampak belum optimal. Jika di antara mereka ada yang meresponnya secara positif atas gagasan desa informasi hanyalah spontanitas. Misalnya para tokoh masyarakat Desa Jagoi yang antusias menyatakan senang jika desanya dijadikan desa informasi seperti desa lainnya. Tetapi kesiapan itu belum tercermin dalam sumber daya masyarakat yang mereka miliki seandainya menjadi desa informasi.

Maka sebenarnya di Desa Jagoi respon terhadap gagasan desa informasi masih sangat prematur. Rendahnya respon masyarakat karena mereka selama ini tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas tentang apa itu desa informasi. Apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat ketika desanya dijadikan desa informasi. Bagaimana dampaknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap pendidikan di masyarakat. Bagaimana solusi untuk menangkal efek negatif dari TIK jika desanya menjadi desa informasi. Hal seperti itu belum pernah disosialisasikan kepada warga masyarakat di Desa Jagoi, dan wilayah desa perbatasan lainnya. Proses itu akan berjalan jika semua komponen pendukung desa informasi terintegrasi satu dengan lainnya.

Sinergitas antarkomponen pendukung desa informasi tersebut menjadi hal utama untuk mewujudkan desa informasi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di sektor sosial, budaya dan ekonomi kreatif. Tidak mungkin sebuah desa informasi di perbatasan akan berdiri sendiri tanpa berjejaringan dengan infrastruktur dan lembaga komunikasi lainnya. Sebagai pertimbangan awal bagi masyarakat desa perbatasan adalah, mendapatkan apa yang dibutuhkan masyarakat desa di perbatasan ketika gagasan desa informasi dapat terwujud didesanya. Pertanyaan itu pernah dilontarkan seorang pemangku adat Dayak Bedayuh di Desa Jagoi ketika berdiskusi dengan peneliti. Merekalah yang menjadi penentu kebijakan di desanya. Ciri khas masyarakat adat seperti Desa Jagoi tidak mudah percaya terhadap program/ kebijakan apapun sebelum ada buktinya. Padahal versi mereka teknologi masih dipahami banyak membawa masalah, daripada membawa berkah bagi masyarakat adat Dayak yang mereka pimpin. Maka konsep untuk meyakinkan kepada orang seperti dia dalam diseminasi gagasan desa informasi menjadi sangat dominan eksistensinya.

PENUTUP

Simpulan

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi respon masyarakat terhadap gagasan desa informasi serta mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan desa informasi di perbatasan. Masyarakat Desa Jagoi, secara epistemologi kurang memiliki kepekaan dan solidaritas dalam merespon gagasan pengembangan desa informasi. Rendahnya solidaritas dan respon itu karena tidak didukung dengan potensi sumber daya masyarakat sebagai komponen utama sebuah desa informasi. Masyarakat Desa Jagoi

masih dominan memerlukan informasi yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar seperti, pangan (sembako), papan, pendidikan, kesehatan, air bersih, lapangan kerja, daripada desa informasi. Sedangkan kebutuhan informasi melalui televisi, radio dan internet, hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hiburan. Sumber informasi masyarakat Desa Jagoi lebih banyak didapatkan dari media massa Malaysia, ketimbang media massa Indonesia.

Maka wajar jika mereka tidak paham terhadap konsep desa informasi yang digagas oleh Pemerintah (Kominfo). Kondisi seperti itu yang ikut mendorong dan memengaruhi respon mereka terhadap konsep dan gagasan desa informasi. Sementara komponen infrastruktur jaringan akses informasi, dan suplai energi listrik dari pemerintah untuk Desa Jagoi masih belum baik, karena di Desa Jagoi sering terjadi pemadaman listrik/ bergiliran. Sementara komponen lembaga komunikasi meski sudah pernah mereka bentuk tetapi dalam kondisi yang tidak aktif, seperti kelompok informasi masyarakat (KIM), PKK, majelis keagamaan dan lainnya. Desa informasi secara konseptual memerlukan terintegrasinya semua komponen pendukung seperti itu. Hal itu bisa terjadi jika ada yang menggerakkan sebagai agen perubahan di komunitas desa yang bersangkutan. Maka sebagai poin simpulannya sebagai berikut:

a) Gagasan untuk pengembangan desa informasi di perbatasan, belum direspon dengan baik oleh tokoh masyarakat (formal dan informal) yang berada di komunitas Desa Jagoi yang dijadikan objek penelitian. Hal ini terjadi karena belum adanya sosialisasi secara konseptual tentang desa informasi secara mendasar bagi para tokoh masyarakat (formal, informal) di Desa Jagoi. Untuk pengembangan desa informasi di Desa Jagoi masih belum ada persiapan standar, dilihat dari sumber daya masyarakat,

sumber daya masyarakat (SDM), dan lainnya. Masyarakat setempat belum pernah mendapatkan akses (pelatihan, training, lokakarya) dan lainnya guna pemberdayaan masyarakat perbatasan, khususnya tentang konseptual dan gagasan desa informasi.

b) Gagasan untuk pengembangan desa informasi di (perbatasan) Desa Jagoi dipengaruhi oleh belum terintegrasinya semua komponen infrastruktur, lembaga komunikasi, dengan sumber daya masyarakat (tokoh formal, tokoh informal, para agen perubahan) di komunitas desa tersebut. Sementara terintegrasinya semua komponen infrastruktur dengan sumber daya masyarakat, sebagai sarana pendukung atas terwujudnya desa informasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat, sangat dibutuhkan di kawasan perbatasan seperti Desa Jagoi. Termasuk pengembangan produk lokal, berupa industri kerajinan rotan yang bisa dijadikan ikon pengelolaan *e-commerce* guna mendukung terwujudnya desa informasi di masa mendatang.

Saran

Bertolak dari latar belakang, kerangka acuan, pembahasan dan simpulan dalam kajian penelitian ini dapat memberikan saran berbagai hal sebagai berikut:

a) Untuk pengembangan desa informasi di wilayah perbatasan diperlukan payung hukum yang mengikat, antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk surat keputusan bersama. Hal ini untuk menghindari tumpang-tindihnya peraturan antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Pendekatan pengembangan desa informasi/ bantuan yang bersifat untuk memberikan dukungan sebaiknya menggunakan model penggabungan

konsep *top-down approach*, dan *bottom-up approach*, agar di satu sisi pemerintah pusat sebagai penyanggah dana bisa ikut melakukan monitoring, dan di sisi lain ada unsur pemberdayaan komunitas desa yang ikut mengambil keputusan pembangunan desanya. Maka konsekuensinya penunjukan sebuah desa yang akan dijadikan “desa informasi” harus dilakukan survei untuk mengidentifikasi, apakah desa yang dimaksud memenuhi persyaratan tertentu dilihat dari beberapa kriteria yang ditentukan. Survei bisa dilakukan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/ kota, akademisi, atau badan, atau lembaga penelitian di mana desa sasaran itu berada.

- b) Konsep desa informasi harus dilaksanakan secara komprehensif atas terintegrasinya antara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan jejaring internet, konten informasi, lembaga komunikasi sosial di masyarakat, sumber daya masyarakat, serta kepastian sumber dana operasionalnya. Jika konsep ini tidak bisa menyatu maka akan berpengaruh terhadap pembentukan desa informasi. Artinya kemungkinan ketidakberhasilannya lebih dominan dari pada kemungkinan keberhasilannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2002). *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Azwar, A. (1998) *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: PT Binarupa Aksara.
- Barthes, Roland. (1997). *Element of Semiology*. Terjemahan Annette Lavers and Collin Smith. London: Jonathan Cope Ltd.
- Denzin, N. K & Lincoln YS. (1994). *Introduction Entering the Field of Qualitative Research* Dalam NK. Denzin & YS Lincoln (eds) *Handbooks of Qualitative Research*. London: Sage Publication.
- Giddens, Anthony. (1997). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in The Late Modern Age*. Stanford: Stanford University Press.
- Hariyanto, Eddy. (2008). *Teknologi Informasi dan Komunikasi: Konsep dan Perkembangannya*, Pemanfaatan TIK Sebagai Media Pembelajaran diperoleh pada tanggal 9 Maret 2014 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/tik-e-learning>.
- Heeks, R. (2002). *Failure Success, and Improvisation of Information System*. Project in Developing Countries Working Paper Series No: 11 Institute for Development Policy.
- Ibrahim, Indi. S. (2011). *Kritik Budaya Komunikasi, Budaya, Media, dan Gaya Hidup Dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kartono. K. & Gulo. (1996). *Kamus Psikologi*, Bandung: Pionir Jaya.
- Margareth, Emanuell C. Lollana N. Uy. (2003). *Information Age e- ASEAN*, Task Force. UNDP- APPID.
- McLuhan. (1964). dalam Stanley J. Baran & Dennis K. Davis. (2010). *Teori Dasar Komunikasi Pengelolaan dan Masa Depan Massa*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Humanika.
- Milles, MB & AM. Haberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjetjep Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Rogers, E.M. (1983). *Difussion Inovations*. Third Edition, The Free Press A. Division of Macmillan Publishing Co, Inc.

Santoso, Widjayanti. M. dkk. (2010). *Internet Masuk Desa Tantangan dan Harapan*. Jakarta: LIPI Press - Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Suprayogo, H. (2010). *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.

Turner, West. (2007). *Introducing Communication Theory Analysis and Application* Third Edition McGraw Hill.

Yin, K. Robert. (2006). *Studi Kasus Design dan Metode*, Alih Bahasa M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Wirawan, Sarlito. (2005). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.